

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT ATAU LEMBAGA KESWADAYAAN
MASYARAKAT DI KOTA MADIUN**

Nurul Qodriyah, Soffia Pudji Estiasih
Universitas WR.Supratman Surabaya
Email : nurul.qodriyah24@gmail.com

Abstract

In the current effort to alleviate poverty in Indonesia, the Kotaku program (City Without Slums) tries to play an active role in assisting the Government in dealing with this crisis. In implementing the program, Kotaku does not go directly to the community, but is assisted by the Community Self-Sufficiency Agency/Institution (BKM/LKM). Through the UPK (Financial Management Unit) institution in each BKM/LKM with the focus of its activities, namely revolving economic activities, the more proactive in carrying out its revolving loan activities. The purpose of this study was to assess the financial performance of UPK in managing revolving loans by UPK BKM/LKM in Madiun City. The research method uses descriptive qualitative analysis, with data collection methods using interviews and documentation, with financial performance indicators that have been determined by the UPK, namely Cost Coverage (CCr), Return on Investment (ROI), Portfolio at Risk (PAR) and Loan at Risk. (LAR), if the results are declared feasible, then the UPK has the right to continue the revolving loan program. The results of this study indicate that the performance of the UPK is said to be feasible to continue the revolving loan program, this is indicated by the presence of a higher ratio value than the value of the financial performance indicators, although there are several indicators that show unsatisfactory results but there are still efforts from the UPK management to continue to take action, corrective actions to maintain the continuity of this revolving loan program so that it can continue.

Kata Kunci : *Community Self Sufficiency Agency/Institution, Financial Management Unit, Financial Performance*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan beberapa langkah-langkah strategis di dalam menyikapi perekonomian Indonesia yang mengalami krisis. Dalam menyelamatkan perekonomian masyarakat Indonesia, beberapa langkah dan strategi yang dibuat oleh Pemerintah antara lain memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktifitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama masa krisis.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen

permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak (Zulkarnain, 2016).

Dalam pelaksanaannya sendiri Program Kotaku menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dimana masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota diposisikan sebagai pelaku utama. Dalam melaksanakan programnya, PNPM Mandiri Perkotaan yang bertransformasi menjadi Kotaku ini, tidak terjun langsung ke masyarakat, tetapi dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ataupun Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). BKM ataupun LKM adalah sebuah wadah yang dibentuk untuk membangun kembali ikatan sosial dan solidaritas sosial sesama warga masyarakat agar mampu mengatasi kemiskinan secara

mandiri dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Penelitian mengenai penilaian kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) juga dilakukan oleh Rahayu (2009), Zuhri (2016), Sucipto (2003) dan PNPM oleh Wijaya (2018).

Melalui lembaga UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang ada di masing-masing BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dengan fokus kegiatannya yaitu kegiatan ekonomi bergulir semakin lebih pro aktif di dalam menjalankan kegiatan pinjaman bergulirnya. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah kinerja pengelolaan pinjaman bergulir pada LKM kota Madiun dalam pengelolaan kredit bergulir berdasarkan rasio keuangan yang telah ditetapkan, apakah LKM Kota Madiun dalam pengelolaan kredit bergulir dapat mempertahankan kelayakannya sebagai unit pengelola keuangan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan pinjaman bergulir pada LKM Kota Madiun guna mempertahankan kelayakannya sebagai unit pengelola keuangan berdasarkan rasio keuangan yang telah ditetapkan.

2. KAJIAN LITERATUR

PNPM Mandiri Perkotaan

Tujuan dibentuknya PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Secara khusus tujuan PNPM MP adalah Membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan/desa peserta program mendapat manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata pemerintahan yang baik (Bakar, 2012). Kemudian PNPM MP bertransformasi menjadi KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

KOTAKU

KOTAKU merupakan program yang menitikberatkan pada peningkatan akses masyarakat dalam infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, dengan cara melakukan sinergi dan pendekatan antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, penguatan peran pemerintah daerah sebagai “nakhoda” dan

menjadikan kolaborasi sebagai platform. Dalam melaksanakan programnya KOTAKU dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Lembaga Keswadayaan Masyarakat

Tujuan dari dibentuknya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) secara umum adalah merumuskan, melaksanakan, dan memonitoring kebijakan dan aturan main secara demokratis sesuai dengan aspirasi warga mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga kelurahan/desa setempat, termasuk penggunaan dana BLM. BKM/LKM dalam melaksanakan programnya dibantu oleh tiga unit, yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS) (Idris, 2017). Dalam menyalurkan dan mengelola bantuan dana dari pemerintah dalam bentuk pinjaman bergulir, BKM/LKM dibantu oleh UPK.

Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas pembukuan UPK yang baik. Untuk menunjukkan hasil kinerja dari UPK diperlukan suatu sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik serta memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas

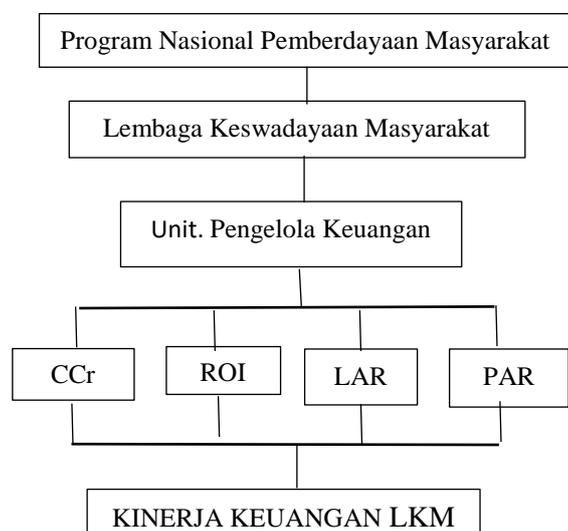
Kinerja UPK dalam mengelola pinjaman bergulir dihitung berdasarkan rasio-rasio keuangan. Ada empat rasio yang digunakan sebagai indikator utama untuk melihat kinerja pengelolaan dana bergulir yang ditujukan untuk mengukur kesehatan UPK, sebagaimana yang disebutkan dalam Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir (Bakar, 2012) yaitu: *Cost Coverage (CCr)*, *Return On Investment (ROI)*, *Loan at Risk (LAR)*, dan *Portfolio at Risk (PAR)*.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menganalisis tentang Kinerja Keuangan UPK pada LKM yang ada di Kota Madiun. Kinerja Keuangan UPK sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kinerja Keuangan UPK meliputi 4 indikator, yaitu LAR (peminjam yang menunggak), PAR (pinjaman yang tertunggak),

ROI (pencapaian laba) dan CCr (efisiensi biaya) (Petinjuk teknis pinjaman bergulis, 2012).

Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan diambil adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis menurut (Sugiono: 2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan koordinator UPK dari LKM sebagai informan yang diambil secara sampling dari 3 LKM yang berbeda.

Untuk memperkuat dan menegaskan analisis data keuangan maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode interview dan dokumentasi. Interview dilakukan kepada dengan informan yang diperoleh dengan cara wawancara secara semi terstruktur. Data dokumentasi berupa Laporan Keuangan BKM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diperoleh dengan cara dokumentasi. Kemudian dari data tersebut dilakukan analisis dengan cara:

1. Menghitung kinerja keuangan, dengan menggunakan pengukur kinerja berupa rasio keuangan sebagai berikut :

a. *Cost Coverage*

Rasio keuangan ini untuk menunjukkan kemampuan UPK iuntuk menutup biaya dari pendapatan yang diperoleh. Perhitungan rasionya adalah sebagai berikut:

Rumus CCr :

$$CCr = \frac{\text{Total pendptan tunai UPK}}{\text{Total biaya tunai UPK}} \times 100\%$$

b. *Return on Investment (ROI)*

Rasio keuangan ini untuk menunjukkan kemampuan UPK untuk menghasilkan laba dari modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir Perhitungan rasionya adalah sebagai berikut:

Rumus ROI:

$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Investasi}} \times 100\%$$

c. *Loans at Risk (LAR)*

Rasio keuangan ini untuk menunjukkan berapa persen peminjam yang menunggak dalam pengembalian pinjaman yang lebih dari 3bulan. Perhitungan rasionya adalah sebagai berikut:

Rumus LAR:

$$LAR = \frac{\text{Jml KSM menunggak} \geq 3 \text{ bl}}{\text{Jumlah KSM peminjam}} \times 100\%$$

d. *Portfolio at Risk (PAR)*

Rasio keuangan ini untuk menunjukkan berapa persen pinjaman yang tertunggak lebih dari 3bulan.

Perhitungan rasionya adalah sebagai berikut:

Rumus PAR:

$$PAR = \frac{\text{Pinjaman tertunggak} \geq 3 \text{ bulan}}{\text{Realisasi saldo pinjaman}} \times 100\%$$

2. Membandingkan hasil penghitungan rasio keuangan berdasarkan tabel indikator program pinjaman dana bergulir dalam modul khusus pinjaman bergulir (Petinjuk teknis, 2012) dan memberikan rekomendasi.

Tabel 1 Indikator Kinerja

Program Pinjaman Dana Bergulir :

Indikator	Rumus	Memuaskan	Minimal	Ditunda
CCr	$\frac{\text{Total Pendapatan UPK}}{\text{Total Biaya UPK}}$	>125 %	>100 %	≤ 100 %
ROI	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Investasi}}$	>10%	>0%	≤ 0%
PAR	$\frac{\text{Pinj. Tertunggak} \geq 3\text{bln}}{\text{Realisasi saldo pinj.}}$	<10%	<20%	≥ 20%
LAR	$\frac{\text{Jml KSM Menunggak} \geq 3\text{bln}}{\text{Jumlah KSM Peminjam}}$	<10%	<20%	≥ 20%

Sumber : Petunjuk Teknis Pinj. Bergulir (2012)

4. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis tentang perbandingan Kinerja Keuangan UPK selama tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Kotaku wilayah Kota Madiun. Data yang digunakan untuk menghitung variabel didapat dari laporan keuangan LKM yang telah di audit pada akhir tahun sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam POS Pengelolaan Keuangan dan Audit Independen

BKM/LKM (2018). Populasi dalam penelitian ini adalah semua LKM yang ada di Kota Madiun yang berjumlah 27 LKM. Metode pengambilan data menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu LKM yang berada di wilayah Kota Madiun yang bersedia memberikan datanya kepada peneliti sampai batas waktu yang ditentukan dan UPK telah mengumumkan laba per 31 Desember 2019 dan 2020 pada laporan keuangan setelah audit.

Tabel 2 Sampel Sesuai Kriteria Periode tahun 2019-2010

Keterangan	Jumlah
Jumlah LKM Kota Madiun	27
Data LKM tidak sesuai kriteria	9
Jumlah sampel yang sesuai kriteria	18

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Data keuangan UPK yang akan digunakan untuk menghitung rasio keuangan yang akan dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kinerja keuangan UPK. Data keuangan tersebut meliputi data Pendapatan, Biaya, Laba Bersih, Modal, jumlah tunggakan, jumlah KSM yang menunggak dan Realisasi Saldo Pinjaman untuk periode tahun 2019-2020.

Pembahasan

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah

1. Menghitung ratio keuangan, untuk mengukur kinerjaUPK dengan menggunakan rasio-rasio *Cost Coverage (CCr)*, *Return On Investment(ROI)*, *Portfolio at Risk(PAR)* dan *Loan At Risk(LAR)*

2. Membandingkan hasil penghitungan rasio keuangan berdasarkan tabel indikator program pinjaman dana bergulir dalam modul khusus pinjaman bergulir (2012) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Indikator kinerja program pinjaman dana bergulir :

Indikator	Rumus	Memuaskan	Minimal	Ditunda
CCr	$\frac{\text{Pendapatan UPK}}{\text{Total Biaya UPK}}$	>125 %	> 100 %	≤ 100 %
ROI	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Investasi}}$	>10%	>0%	≤ 0%
PAR	$\frac{\text{Pinj. Tertunggak } \geq 3\text{bln}}{\text{Realisasi saldo pinj.}}$	<10%	<20 %	≥ 20%

LAR	Jml KSM Menunggak ≥ 3bln	<10%	<20 %	≥ 20%
	jml KSM Peminjam			

Sumber : Petunjuk Teknis Pinj. Bergulir (2012)

1. Menghitung rasio keuangan dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

a. *Cost Coverage (CCr)*

Dari perhitungan rasio *Cost Coverage (CCr)* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4 *Cost Coverage (CCr)* Periode tahun 2019 dan 2020

No	Nama UPK-LKM	Pendapatan (000 rp)		Biaya (000 rp)		CCr	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	UPK-LKM Bango Makmur	81	422	96	1.116	85%	38%
2	UPK-LKM Bhakti Mandiri	15.960	14.190	9.648	5.574	165%	255%
3	UPK-LKM Kelun Sukses	12.769	7.541	4.750	4.972	269%	152%
4	UPK-LKM Klegen Jaya	24.244	24.328	15.377	7.958	158%	306%
5	UPK-LKM Kridha Mandiri	8.357	3.739	4.836	1.759	7%	213%
6	UPK- LKM Puspoharjo Mandiri	252	253	1.609	2.212	16%	11%
7	UPK-LKM Rejomulyo	33.080	34.192	13.733	14.199	241%	241%

	Mandiri						
8	UPK-LKM Sukosari Mandiri	2.265	4.515	2.729	2.683	83%	168%
9	UPK-LKM Tawangrejo Sejahtera	945	397	1.666	2.603	57%	15%
10	UPK-LKM Anugerah	16.099	16.102	13.342	14.556	121%	111%
11	UPK-LKM Pandan Sari	8.249	6.854	2.695	2.482	306%	276%
12	UPK-LKM Rukun Sejahtera	5.105	4.461	753	1.889	678%	236%
13	UPK-LKM Reksogati	16.696	16.637	9.652	10.036	173%	166%
14	UPK-LKM Prajna Utama	25.948	23.729	11.015	10.800	236%	220%
15	UPK-LKM Mahkota	1.857	1.263	1.751	1.124	106%	112%
16	UPK-LKM Kenongo Mulyo	611	602	978	1.216	62%	49%
17	UPK-LKM Berkah Jaya	2.837	1.843	1.369	723	207%	255%
18	UPK-LKM Sejahtera	-	-	1.304	-	0,00%	0,00%
Rata – rata						165%	157%

Sumber : Data sekunder diolah ,2021

Hasil pengujian terhadap CCr menunjukkan bahwa nilai CCr terendah pada tahun 2020 sebesar 0% dimiliki oleh UPK LKM Sukosari Mandiri yang berada di Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, hal ini dikarenakan tidak adanya aktivitas pengguliran pinjaman akibat macetnya seluruh pinjaman yang digulirkan. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan Ibu Uno, UPK dari LKM Puspoharjo Mandiri, Kelurahan Kartoharjo kecamatan Kartoharjo, beliau mengatakan bahwa ‘Ya karena masa pandemi ini mbak, usaha banyak yang nggak jalan, akhirnya kemampuan bayar mereka juga berkurang. Selain itu yang bagian nagih juga ga berani keluar rumah mendatangi KSM nya, karena takut ketularan COVID. Akhirnya LKM kami ga ada pendapatan tapi biayanya kan tetap ada misalnya

biaya bank dan insentif pegawai UPK gak mungkin lah gak dibayar”

Nilai tertinggi pada tahun 2020 sebesar 306% dimiliki oleh UPK LKM Klegen Jaya yang berada di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo. Dengan nilai CCr yang tinggi ini, Ibu Novi Herawati selaku UPK dari LKM Klegen Jaya, kelurahan Klegen, kecamatan Kartoharjo mengatakan “Kami UPK LKM Klegen Jaya memang mempunyai komitmen yang tinggi dalam menagih piutang KSM. Walaupun dalam masa pandemi, petugas UPK bekerja sama dengan ketua KSM nya tetap berusaha melakukan penagihan atas piutang ini, sehingga pendapatan kami tetap tinggi dan para anggota KSM juga mau kok membayar walaupun mungkin mereka sedang kesulitan usahanya terdampak pandemi. Karena mereka gak mau terkena blacklist jika menunggak.”

b. Return On Investment (ROI)

Dari perhitungan rasio *Return On Investment (ROI)* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5 *Return on Investment*

Periode tahun 2019 dan 2020

No	Nama UPK-LKM	Laba (000 rp)		Modal Inv.(000 rp)		ROI	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	UPK-LKM Bango Makmur	-	(62)	20.000	20.000	0%	0%
2	UPK-LKM Bhakti Mandiri	5.690	31	56.000	56.000	10%	0%
3	UPK-LKM Kelun Sukses	9.260	(22.022)	51.000	51.000	18%	-43%
4	UPK-LKM Klegen Jaya	30.634	5.210	84.500	84.500	36%	6%
5	UPK-LKM Kridha Mandiri	6.993	(8.958)	28.500	28.500	25%	-31%
6	UPK- LKM Puspoharjo Mandiri	1.088	510	42.000	42.000	3%	1%
7	UPK-LKM Rejomulyo Mandiri	20.025	20.466	101.500	101.500	20%	20%
8	UPK-LKM Sukosari Mandiri	2.862	2.276	42.000	42.000	7%	5%
9	UPK-LKM Tawangrejo Sejahtera	(11.657)	(2.602)	29.500	29.500	-40%	-9%
10	UPK-LKM Anugerah	(63.384)	1.567	106.750	106.750	-59%	1%
11	UPK-LKM Pandan Sari	(36.825)	(9.315)	77.250	77.250	-48%	-12%
12	UPK-LKM Rukun Sejahtera	(11.838)	(1.440)	37.500	37.500	-32%	-4%
13	UPK-LKM Reksogati	(2.540)	5.280	65.500	65.500	-4%	8%
13	UPK-LKM Reksogati	(2.540)	5.280	65.500	65.500	-4%	8%
14	UPK-LKM Prajna Utama	6.112	8.537	93.950	93.950	7%	9%
15	UPK-LKM Mahkota	(25.988)	(8.138)	37.500	37.500	-69%	-22%
16	UPK-LKM Kenongo Mulyo	(23.320)	(450)	47.500	47.500	-49%	-1%
17	UPK-LKM Berkah Jaya	1.217	643	25.000	25.000	5%	3%
18	UPK-LKM Sejahtera	9.360	-	28.500	28.500	33%	0%
Rata - rata						-8%	-4%

Sumber : Data sekunder diolah ,2021

Hasil pengujian terhadap ROI menunjukkan bahwa nilai ROI terendah pada tahun 2020 sebesar (43%) dimiliki pada LKM Kelun Sukses yang berada di Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo. Nilai minus yang dihasilkan dari perhitungan ROI ini mengindikasikan bahwa LKM tersebut mengalami kerugian pada tahun yang dimaksud. Jika dibandingkan dengan CCr yang menghasilkan nilai positif, ternyata diketahui bahwa nilai minus yang terjadi tersebut disebabkan oleh adanya biaya resiko pinjaman yang dibebankan dikarenakan adanya pinjaman-pinjaman yang tertunggak yang

akhirnya menimbulkan Rugi pada laporan Laba Rugi dan mengakibatkan nilai minus pada ROI.

Kondisi pandemi menyebabkan adanya kesulitan para anggota KSM dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ismoe UPK dari LKM Kelun Sukses, kelurahan Kelun kecamatan Kartoharjo yang mengatakan bahwa pendapatan UPK menurun drastis selama pandemi tunggakan makin banyak sehingga biaya resiko pinjaman pada tahun 2020 menjadi besar otomatis laba menjadi berkurang.

c. *Portfolio At Risk (PAR)*

Dari perhitungan rasio *Portfolio At Risk (PAR)* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6 *Portfolio at Risk (PAR)*
Periode tahun 2019 dan 2020

No	Nama UPK-LKM	Pinj. tertunggak > 3bl		Realisasi Saldo Pinj.		PAR	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	UPK-LKM Bango Makmur	9.443	9.443	9.443	12.343	100%	77%
2	UPK-LKM Bhakti Mandiri	8.686	26.611	52.311	73.161	17%	36%
3	UPK-LKM Kelun Sukses	19.735	26.735	49.785	46.085	40%	58%
4	UPK-LKM Klegen Jaya	14.000	25.888	127.850	149.537	11%	17%
5	UPK-LKM Kridha Mandiri	6.880	12.020	32.580	45.420	21%	26%
6	UPK-LKM Puspoharjo Mandiri	24.800	22.775	24.800	22.775	100%	100%
7	UPK-LKM Rejomulyo Mandiri	590	-	88.390	135.350	1%	0%
8	UPK-LKM Sukosari Mandiri	9.325	9.625	30.825	24.625	30%	39%
9	UPK-LKM Tawangrejo Sejahtera	27.285	25.185	27.285	25.185	100%	100%
10	UPK-LKM Anugerah	72.856	65.356	129.706	135.501	56%	48%
11	UPK-LKM Pandan Sari	45.996	55.506	67.216	68.406	68%	81%
12	UPK-LKM Rukun Sejahtera	16.485	20.135	40.198	26.725	41%	75%
13	UPK-LKM Reksogati	10.250		66.600	69.435	15%	25%

			17.635				
14	UPK-LKM Prajna Utama	46.905	50.905	152.405	145.005	31%	35%
15	UPK-LKM Mahkota	50.800	44.800	50.800	44.800	100%	100%
16	UPK-LKM Kenongo Mulyo	29.043	29.043	29.043	29.043	100%	100%
17	UPK-LKM Berkah Jaya	-	-	9.100	-	0,00%	0,00%
18	UPK-LKM Sejahtera	24.882	24.882	24.882	24.882	100%	100%
Rata - rata						52%	57%

Sumber : Data sekunder diolah ,2021

Hasil pengujian terhadap PAR menunjukkan bahwa nilai PAR tertinggi pada tahun 2019 sebesar 100% dimiliki oleh 6 LKM yaitu LKM Bango Makmur, LKM Puspoharjo Mandiri, LKM Tawangrejo Sejahtera, LKM Mahkota, LKM Kenongo Mulyo dan LKM Sejahtera dan nilai PAR tertinggi pada tahun 2020 sebesar 100% dimiliki oleh 5 yaitu LKM Puspoharjo Mandiri, LKM Tawangrejo Sejahtera, LKM Mahkota, LKM Kenongo Mulyo dan LKM Sejahtera.

Sedangkan nilai terendah PAR pada tahun 2019 sebesar 7% dimiliki oleh LKM Rejomulyo

Mandiri yang berada di Kelurahan Rejomulyo, kecamatan Kartoharjo pada tahun 2020 sebesar 0% dimiliki tetap oleh LKM Rejomulyo Mandiri yang berada di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo. Bapak Budi Setiawan, UPK LKM Rejomulyo juga menegaskan tentang hal ini “ya kan penagihan kami bagus anggota KSM juga mau bekerjasama jadi ya hasil LKM Rejomulyo bagus. Saat ada yang mau mengajukan pinjaman kami benar-benar melakukan seleksi yang cukup ketat. Jadi benar-benar tau kemampuan bayar anggota KSM sehingga lancar semuanya”

d. *Loan At Risk (LAR)*

Dari perhitungan rasio *Loan At Risk (LAR)* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 7 *Loan at Risk (LAR)*
Periode tahun 2019 dan 2020

No	Nama UPK-LKM	KSM		Jumlah KSM		PAR	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	UPK-LKM Bango Makmur	4	4	4	5	100%	80%
2	UPK-LKM Bhakti Mandiri	3	5	10	9	30%	56%
3	UPK-LKM Kelun Sukses	2	3	6	5	33%	60%
4	UPK-LKM Klegen Jaya	2	4	13	14	15%	29%
5	UPK-LKM Kridha Mandiri	4	5	11	9	36%	56%
6	UPK- LKM Puspoharjo Mandiri	19	18	19	18	100%	100%
7	UPK-LKM Rejomulyo Mandiri	1	-	14	13	7%	0%
8	UPK-LKM Sukosari Mandiri	7	8	9	10	78%	80%
9	UPK-LKM Tawangrejo Sejahtera	10	10	10	10	100%	100%
10	UPK-LKM Anugerah	4	4	16	12	25%	33%

11	UPK-LKM Pandan Sari	6	6	10	10	60%	60%
12	UPK-LKM Rukun Sejahtera	5	6	12	8	42%	75%
13	UPK-LKM Reksogati	3	3	10	10	30%	30%
14	UPK-LKM Prajna Utama	4	5	10	10	40%	50%
15	UPK-LKM Mahkota	9	9	9	9	100%	100%
16	UPK-LKM Kenongo Mulyo	14	14	14	14	100%	100%
17	UPK-LKM Berkah Jaya	-	-	-	-	0%	0%
18	UPK-LKM Sejahtera	9	9	9	9	100%	100%
Rata - rata						55%	62%

Sumber : Data sekunder diolah ,2021

Hasil pengujian terhadap LAR menunjukkan bahwa nilai LAR tertinggi pada tahun 2019 sebesar 100% dimiliki oleh 6 LKM yaitu LKM Bango Makmur, LKM Puspoharjo Mandiri, LKM Tawangrejo Sejahtera, LKM Mahkota, LKM Kenongo Mulyo dan LKM Sejahtera dan nilai PAR tertinggi pada tahun 2020 sebesar 100% dimiliki oleh 5 yaitu LKM Puspoharjo Mandiri, LKM Tawangrejo Sejahtera, LKM Mahkota, LKM Kenongo Mulyo dan LKM Sejahtera.

Sedangkan nilai terendah LAR pada tahun 2019 sebesar 1% dimiliki oleh LKM Rejomulyo Mandiri yang berada di Kelurahan Rejomulyo, kecamatan Kartoharjo pada tahun 2020 sebesar 0% dimiliki tetap oleh LKM Rejomulyo Mandiri yang berada di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo

2. Membandingkan hasil penghitungan rasio keuangan berdasarkan tabel indikator program pinjaman dana bergulir dalam modul khusus pinjaman bergulir.

Dari hasil perhitungan rasio-rasio keuangan diatas diperoleh hasil ringkas sebagai berikut :

Tabel 8 Hasil Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan UPK
Periode 2019-2020

No	Nama BKM	CCr		ROI		LAR		PAR	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	LKM Bango Makmur	85%	38%	0%	0%	100%	77%	100%	80%
2	LKM Bhakti Mandiri	165%	255%	10%	0%	17%	36%	30%	56%
3	LKM Kelun Sukses	269%	152%	18%	-43%	40%	58%	33%	60%
4	LKM Klegen Jaya	158%	306%	36%	6%	11%	17%	15%	29%
5	LKM Kridha Mandiri	173%	213%	25%	-31%	21%	26%	36%	56%
6	LKM Puspoharjo Mandiri	16%	11%	3%	1%	100%	100%	100%	100%
7	LKM Rejomulyo Mandiri	241%	241%	20%	20%	1%	0%	7%	0%
8	LKM Sukosari Mandiri	83%	168%	7%	5%	30%	39%	78%	80%

9	LKM Tawangrejo Sejahtera	57%	15%	-40%	-9%	100%	100%	100%	100%
10	LKM Anugerah	121%	111%	-59%	1%	56%	48%	25%	33%
11	LKM Pandan Sari	306%	276%	-48%	-12%	68%	81%	60%	60%
12	LKM Rukun Sejahtera	678%	236%	-32%	-4%	41%	75%	42%	75%
13	LKM Reksogati	173%	166%	-4%	8%	15%	25%	30%	30%
14	LKM Prajna Utama	236%	220%	7%	9%	31%	35%	40%	50%
15	LKM Mahkota	106%	112%	-69%	-22%	100%	100%	100%	100%
16	LKM Kenongo Mulyo	62%	49%	-49%	-1%	100%	100%	100%	100%
17	LKM Berkah Jaya	207%	255%	5%	3%	0%	0%	0%	0%
18	LKM Sejahtera	0%	0%	33%	0%	100%	100%	100%	100%
	RATA-RATA	165%	157%	-8%	-4%	52%	57%	55%	62%

Sumber : Data sekunder diolah ,2021

Hasil perhitungan kinerja keuangan diperoleh dari menghitung rasio keuangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat 8 (delapan) UPK yang masuk dalam kategori memuaskan. Setelah dibandingkan dengan hasil penghitungan rasio keuangan berdasarkan tabel indikator program pinjaman dana bergulir dalam modul khusus pinjaman bergulir (2012). Untuk Nilai rasio CCr, UPK LKM Kota Madiun masuk dalam kategori Memuaskan.
2. Terdapat 4 UPK LKM yang masuk dalam kategori minimal. Walaupun rasio CCr nya masuk kategori memuaskan, jika dilihat dari rasio ROI, PAR dan LAR nya masih belum memenuhi persyaratan masuk kategori memuaskan. Untuk Rasio ROI yang biasanya sebanding dengan rasio CCr, untuk beberapa UPK ini tidak sebanding nilai rasionya. Walaupun secara umum masih mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020.
3. Untuk Kategori Penundaan, ada 6 UPK LKM yang masuk di kategori ini. Nilai rasio CCr, ROI, PAR, dan LAR nya cukup rendah. Yang jika dibandingkan dengan Tabel Kinerja Keuangan

Pinjaman Bergulir maka bisa dikategorikan masuk di kategori penundaan, yang artinya kinerja nya belum cukup baik. Terutama jika dilihat dari rasio PAR dan LAR nya yang banyak mencapai nilai 100% yang menandakan adanya kemacetan dalam penguliran pinjaman.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan yang telah peneliti lakukan pada LKM Kota Madiun tahun 2019 dan 2020 dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Hasil penghitungan danya beberapa LKM yang hasil penghitungan CCr nya adalah minus, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut biaya yang dikeluarkan oleh LKM tersebut lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Biaya yang besar ini disebabkan karena besarnya biaya cadangan kerugian piutang yang harus dialokasikan oleh LKM dikarenakan banyaknya LKM yang belum bisa membayar angsuran pinjaman.
- 2) Pada tahun 2020 beberapa LKM rata-rata kondisinya membaik, dilihat dari makin naiknya nilai CCr dan ROI dibandingkan tahun 2019, hal ini menunjukkan masih

adanya upaya dari LKM untuk menstabilkan nilai ROI sehingga kelangsungan UPK masih dapat dipertahankan.

- 3) Terdapat kenaikan nilai LAR antara tahun 2019 dan 2020, hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya usaha anggota KSM yang terdampak dan ditambah pula adanya petugas UPK yang tidak berani penagihan langsung pada KSM. Adapun saran yang diberikan apabila pandemi sudah berlalu dan keadaan mulai normal dan membaik agar petugas UPK dapat melakukan penagihan langsung pada para anggota KSM, sehingga rasio LAR bisa makin menurun.
- 4) Terdapat kenaikan nilai PAR antara tahun 2019 dan 2020, Kenaikan LAR dan PAR memang cenderung sebanding, demikian pula nilai penghitungan PAR dari LKM Kota Madiun menunjukkan adanya peningkatan jumlah pinjaman yang tidak tertagih atau terbayar sebagian. Adapun saran yang diberikan agar UPK berupaya untuk terus melakukan penagihan supaya program pinjaman bergulir ini masih bisa terus berjalan.

Daftar Pustaka

- Bakar, Armen Effendi. (2014) - *“Kiat Sukses Pengelolaan Pinjaman Bergulir di PNPB Perkotaan”*. Kementerian PUPR.2014
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum. (2014). *“Petunjuk Teknis Pendampingan, Pencairan Dan Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)”*.Jakarta
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum. (2014). *“Petunjuk Teknis Pembukuan Unit Pengelola Keuangan (UPK)”*.Jakarta
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum. (2012). *“Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir”*.Jakarta
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum. (2014). *“Petunjuk Teknis Keorganisasian dan Pengawasan UPK”*.Jakarta
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum. (2014). *“Pedoman Pelaksanaan PNPB Mandiri Perkotaan”*.Jakarta
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum. (2014). *“Modul Khusus Komunitas BKM/LKM Tugas dan Fungsi BKM”*.Jakarta
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum. (2016). *“Pedoman Umum KOTAKU”*. Jakarta
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum. (2018). *“Pengelolaan Keuangan dan Audit Independen BKM/LKM”*.Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *“Standar Akuntansi Keuangan”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idris, Muhammad. (2017). *“Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelola Keuangan pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPB Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul”*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rahayu, Puji. (2009). *“Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pengawasan Penggunaan dan Pengelolaan Dana P2KP di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal”*. *Jurnal Kajian Sosiologi.*, volume 3, no1, Yogyakarta
- Sucipto. (2003). *“Penilaian Kinerja Keuangan”*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, volume 1-12, Universitas Sumatra Utara. Medan
- Sugiyono. (2015). *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D”*. Bandung: Alfabeta

- Wijaya, Arif (2018). “Analisis Kinerja Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2017”. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri
- Zulkarnain, Kurniawan. (2016). “*Tramsformasi PNPM Perkotaan menuju KOTAKU dari Jendela PPM*”. Kementrian PUPR.2016, Jakarta
- Zuhri, M.Tammima. (2016). “*Analisa Kinerja Keuangan pada Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dibawah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Karangwaru Yogyakarta*” . Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta